

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 29/05/2023, Diperbaiki: 19/06/2023, Diterbitkan: 20/06/2023

IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA MELALUI PROGRAM UPPKS DI KECAMATAN PADANG LAWEH KABUPATEN DHARMASRAYA

Annisa Fitri¹

¹) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia.

Email: fitriannisa@unespadang.ac.id

Corresponding Author: Annisa Fitri

ABSTRACT

The implementation of family economic empowerment through the Prosperous Family Income Increasing Business (UPPKS) program in Padang Laweh District, Dharmasraya Regency is a strategic effort to improve family welfare in the region. This program aims to support and train families in developing micro and small businesses to increase income, especially for vulnerable groups in society, including women, youth, and poor families. The principles of inclusiveness, gender equality, and poverty alleviation form the basis for empowering families through this program. The method used in this research is a qualitative research method with a descriptive approach in which data collection is carried out using interviews, observation, documentation, and literary techniques. The population in this study were all KB Office staff, the UPPKS group, and the community in Padang Laweh sub-district with a total sample of 11 people who met the criteria in answering the problem formulation. The research location is in the Family Planning Center, Padang Laweh District, Dharmasraya Regency. Through the implementation of family economic empowerment through the UPPKS program in Padang Laweh District, it is hoped that there will be an increase in family income, an increase in welfare, and a reduction in the poverty rate in the region. In addition, this program is also expected to contribute to local economic development, increasing family independence, and community empowerment at the local level.

Keywords: *Family Economic Empowerment, UPPKS Program, Welfare*

ABSTRAK

Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di wilayah tersebut. Program ini bertujuan untuk mendukung dan melatih keluarga dalam mengembangkan usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan pendapatan, terutama bagi kelompok masyarakat rentan, termasuk perempuan, pemuda, dan keluarga miskin. Prinsip inklusivitas, kesetaraan gender, dan

pengentasan kemiskinan menjadi dasar pemberdayaan keluarga melalui program ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan kepustakaan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas Kantor KB, kelompok UPPKS, dan masyarakat di Kecamatan Padang Laweh dengan jumlah sampel sebanyak 11 orang yang memenuhi kriteria dalam menjawab rumusan masalah. Lokasi penelitian di Balai Keluarga Berencana Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya. Melalui pelaksanaan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui program UPPKS di Kabupaten Padang Laweh diharapkan terjadi peningkatan pendapatan keluarga, peningkatan kesejahteraan, dan penurunan angka kemiskinan di wilayah tersebut. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kemandirian keluarga, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.

Kata Kunci: Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Program UPPKS, Kesejahteraan.

PENDAHULUAN

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan program yang pelaksanaannya terintegrasi dengan program keluarga berencana yang bertujuan meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Dengan pemberdayaan ekonomi melalui program UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) dapat memberikan akses, pengetahuan, dan dukungan kepada keluarga miskin atau rentan dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan mereka. Salah satu komponen utamanya dari program UPPKS adalah memberikan modal usaha kepada keluarga miskin atau rentan, selain itu program UPPKS juga melibatkan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan keluarga dalam mengelola usaha. Program UPPKS juga mendorong pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, pemasok, distributor, dan mitra bisnis lainnya. Kemitraan ini dapat memberikan akses yang lebih luas ke pasar, sumber daya, dan peluang usaha yang dapat mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha keluarga. Program UPPKS dapat membantu keluarga untuk mengembangkan strategi pemasaran, memperluas jaringan, dan mencari peluang pasar yang sesuai dengan produk atau layanan yang mereka hasilkan. Program UPPKS juga berfokus pada penguatan kelembagaan dan jaringan kelompok UPPKS. Dalam konteks ini, keluarga yang tergabung dalam kelompok UPPKS dapat saling mendukung, berbagi pengalaman, dan bertukar informasi. Kelembagaan yang kuat dan jaringan yang baik dapat memberikan akses yang lebih baik ke sumber daya dan peluang usaha. Melalui program UPPKS yang bertujuan untuk memberdayakan keluarga miskin atau rentan secara ekonomi, meningkatkan pendapatan mereka, dan mendorong kemandirian ekonomi. (1)

Di Kecamatan Padang Laweh yang terdiri dari 4 Nagari terbagi kedalam 17 Jorong, 4 Jorong diantaranya mengikuti program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dari 4 jorong tersebut ada 6 UPPKS dan 1 diantaranya sudah tidak aktif berproduksi lagi disebabkan oleh ketahanan kelompok. Selain itu dalam pelaksanaannya pun terdapat permasalahan yang membelit kelompok UPPKS yaitu banyaknya keanggotaan kelompok sudah pecah kongsi, kelompok tidak memiliki pengurus, tidak jalan usaha kelompok,

tidak mempunyai informasi tentang bentuk dan akses modal, rendahnya kemampuan dalam mengelola modal, pemetaan usaha tidak jelas, kemasan dan pemasaran produk tidak kejar pangsa pasar serta akses informasi yang tidak memadai.

Maka penelitian ini penting dilakukan karena program UPPKS bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi dengan memberdayakan keluarga miskin atau rentan melalui pengembangan usaha. kemudian dapat membantu memahami dampak nyata dari program UPPKS terhadap peningkatan pendapatan keluarga dan kesejahteraan ekonomi mereka. Selanjutnya juga dapat membantu dalam perumusan kebijakan yang lebih baik, dapat memberikan informasi penting tentang keberhasilan, kelemahan, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi program UPPKS. Kemudian dapat juga menjadi acuan untuk penelitian lebih lanjut dan pengembangan kebijakan di bidang ini. Dengan urgensi penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan efektivitas program UPPKS dalam memberdayakan keluarga akar rumput secara ekonomi dan mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya. Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah dukungan pemerintah dan sektor lainnya dalam pemberdayaan ekonomi melalui UPPKS, manfaat program UPPKS dari sisi pendapatan dan kesempatan kerja bagi keluarga, dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan program UPPKS di Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya. Teknik pengumpulan data menggunakan dua pendekatan yaitu, wawancara mendalam (*indepth interview*) dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*). Wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan kepada pengurus, anggota, pemerintah dan *stakeholder*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif dengan model analisis data Miles and Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Program UPPKS Di Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya

1. Identifikasi Keluarga Peserta

Pemberdayaan ekonomi melalui program UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) bertujuan untuk memberikan akses, pengetahuan, dan dukungan kepada keluarga miskin atau rentan dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan mereka. Melalui program UPPKS ini yang merupakan binaan langsung dari BKKBN. Dan pada tingkat Kabupaten Dharmasraya dinaungi langsung oleh Dinas Sosial Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dinas Sosial P3AP2KB). UPPKS Di Kecamatan Padang Laweh sudah dimulai sejak tahun 2010 dan mulai berkembang tahun 2019. Dalam rangka membantu perekonomian masyarakat yang merupakan tujuan dari program UPPKS ini, syarat untuk menjadi anggota kelompok

terbilang mudah yaitu Pasangan Usia Subur (PUS), Peserta Keluarga Berencana (KB), remaja, dan kelompok lanjut usia, siap untuk bertanggung jawab dengan usaha yang akan dijalankan, serta mau untuk melakukan pelatihan dan pembinaan yang diberikan oleh PLKB maupun Dinsos P3PA2KB.

Dengan syarat menjadi anggota kelompok yang cukup mudah, Kelompok UPPKS diharapkan memiliki kemandirian keluarga dan bisa menghasilkan kegiatan produktif yang menghasilkan pundi pundi rupiah untuk kebutuhan sehari hari dan untuk tabungan masa depan . Kelompok UPPKS di Kecamatan Padang Laweh saat ini berjumlah lima kelompok yaitu kelompok UPPKS Tiga Putra dengan usaha kue, UPPKS Suka Maju dengan usaha tas rajut, UPPKS Budi Utomo dengan usaha keripik tempe, UPPKS Aur Kuning Jaya dengan usaha keripik balado, UPPKS Usaha Tempe Mbah Magiyem dengan usaha tempe basah. Namun dalam pelaksanaan aktivitas administrasi program UPPKS terdapat kendala kendala yaitu pelaksana atau implementor kebijakan tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP. Bantuan dana pengembangan usaha yg belum ada dari pemerintah kabupaten. Program UPPKS mulai berdiri pertama kali tahun 2010 dan berkembang tahun 2019, akan tetapi SK camat baru dikeluarkan tahun 2022.

Berdasarkan uraian diatas penulis menganalisa bahwa aktivitas aministrasi sudah berjalan namun belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada hal ini dikarenakan masih minimnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan Program UPPKS di kecamatan padang laweh serta masih kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia dalam mengolah data laporan kelompok serta Sumber Daya Anggaran yang belum memadai untuk pengembangan kelompok. Keterbatasan Sumber Daya ini Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, tenaga kerja, maupun infrastruktur. Program UPPKS membutuhkan dana yang cukup untuk memberikan bantuan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan kepada keluarga peserta. Jika anggaran terbatas, implementasi program dapat terhambat dan cakupan program mungkin terbatas.

2. Fungsi Pembagian kerja

Seperti yang diketahui Program UPPKS ini merupakan Program Dari BKKBN dan untuk Kabupaten Dharmasraya di bawah naungan dinas sosial P3AP2KB dan di fasilitatori oleh PLKB Kecamatan Padang Laweh dan diawasi oleh Camat Padang Laweh. Peran dari setiap pihak sangat diperlukan yang mana setiap pihak memiliki pembagian kerjanya masing masing, seperti BKKBN merupakan pembuat kebijakan program dari UPPKS ini yang mana program ini diterapkan di kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Selain itu tugasnya adalah menyusun dan memberi pembinaan dan pelatihan materi materi tentang ekonomi produktif kepada kelompok UPPKS yang ada di Kecamatan Padang Laweh dengan mengunjungi Balai KB Kecamatan Padang Laweh. Di tingkat kecamatan, Camat Padang Laweh juga turut berpartisipasi dalam program UPPKS ini sebagai pengawas jalannya program tersebut dan berkoordinasi langsung dengan PLKB , PLKB merupakan fasilitator yang terjun kelapangan dalam membina kelompok-kelompok UPPKS yang ada di Kecamatan

Padang Laweh, melakukan kunjungan lapangan, pengumpulan laporan bulanan, pencatatan administrasi dan sebagai penerus informasi dari Dinas Sosial P3AP2KB. kelompok UPPKS yang ada di Kecamatan Padang Laweh sudah memiliki struktur dan pembagian tugasnya masing masing, seperti ketua sebagai pemimpin kelompok, sekretaris , bendahara, dan anggota kelompok UPPKS. Berdasarkan tugas dan fungsinya pihak telah cukup baik. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah , yaitu kurangnya pembinaan dan pelatihan terkait materi yang diberikan kepada kelompok di Kecamatan Padang Laweh dan juga penulis menemukan perbedaan pernyataan antara PLKB dan Anggota kelompok UPPKS terkait pemberian pelatihan dan pembinaan dari Dinas sosial P3AP2KB. Dari fungsi pembagian kerja penulis menyimpulkan bahwa fungsi pembagian kerja sudah berjalan namun belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dikarenakan masih kurangnya pengetahuan teknologi SDM dalam kelompok UPPKS yang di akibatkan pelatihan dan pembinaan dari pihak Kabupaten yang jarang dilakukan dan tidak memadai. Hal ini tentu menjadi kesulitan tersendiri bagi kelompok untuk mendapatkan pengetahuan untuk mengembangkan kelompok usahanya.

3. Kualitas Kebijakan

Pelaksanaan program UPPKS di Kecamatan Padang Laweh perlu di kembangkan agar Tujuan dari Program UPPKS itu sendiri tercapai. Dengan pengembangan Kelompok UPPKS maka akan semakin banyak Keluarga dari Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera 1 keluar dari golongan tersebut yang dapat juga diartikan kenaikan taraf hidupnya menjadi sejahtera, tidak hanya itu melalui kelompok UPPKS ini juga meningkatkan ekonomi Produktif keluarga serta Kecamatan Padang Laweh. Namun hal-hal positif tersebut diiringi pula dengan berbagai kendala seperti kurangnya pembinaan pelatihan dari kepala seksi bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga untuk kelompok UPPKS Banyak keluarga yang bergabung dalam program UPPKS memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terbatas dalam pengelolaan usaha dan kewirausahaan. Hal ini dapat menjadi kendala dalam mengembangkan usaha mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya pendidikan dan pelatihan yang intensif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta program. Selain itu dalam pengimplementasiannya juga terdapat kendala dari kelompok seperti masih kurangnya pengetahuan teknologi anggota kelompok UPPKS sehingga kelompok hanya melakukan tugasnya secara manual dan pemasaran produk juga yang terbilang kurang yang diakibatkan oleh kurangnya sarana dan prasarana yang membantu kelompok UPPKS. selanjutnya Kesulitan dalam mengakses pasar yang luas dan jaringan bisnis yang baik juga dapat menjadi kendala. Bagi keluarga yang memiliki usaha kecil, mereka mungkin kesulitan dalam memasarkan produk mereka atau menjalin kemitraan yang bermanfaat. Diperlukan dukungan dan pendampingan untuk membantu mereka memperluas jangkauan pasar dan mengembangkan jaringan bisnis yang lebih luas. Serta Faktor budaya dan sosial juga dapat menjadi kendala dalam implementasi program UPPKS. Beberapa keluarga memiliki keyakinan atau praktik yang menghambat partisipasi dalam program atau mengubah pola pikir mereka terkait usaha

dan kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, perlu adanya pendekatan yang sensitif terhadap budaya dan sosial dalam mendukung perubahan pola pikir dan praktek yang lebih inklusif.

4. Kapasitas Organisasi

Program UPPKS di Kecamatan Padang Laweh mulai berkembang pada tahun 2019. Dan pada tahun 2022 keluarlah keputusan Camat Padang laweh NOMOR :188.45/09/KPTS-PL/2022 tentang penunjukan penetapan kader usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) di Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2022 melalui keputusan ini dapat dikatakan bahwa pada tahun 2022 anggota kelompok UPPKS di Kecamatan Padang Laweh sudah menjadi kader dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga khususnya di Kecamatan Padang Laweh dengan jumlah 24 kader. Dalam pelaksanaan program 24 kader dibagi menjadi lima kelompok berdasarkan jorong tempat tinggal, selain itu fasilitator UPPKS berjumlah 2 orang yang merupakan PLKB dan 1 orang Sekretaris Balai KB, untuk perwakilan dari Dinas Sosial P3AP2KB yaitu Kepala Seksi Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga . jadi jumlah Sumber daya manusia alam pelaksanaan program UPPKS di Kecamatan Padang Laweh berjumlah 28 orang. Permasalahannya adalah pelaksanaan untuk memenuhi kapasitas organisasi yaitu masih kurangnya minat dan partisipasi masyarakat untuk mengikuti program UPPKS, yang membuat kelompok masih kekurangan sumber daya manusia, selain itu pembinaan yang jarang dilakukan juga berdampak melambatnya perkembangan dari program UPPKS di Kecamatan Padang Laweh. Adapun upaya yang penulis analisa untuk mengatasi kendala kendala di atas adalah dengan mensosialisasikan mengenai pentingnya program UPPKS bagi keluarga ,masyarakat, dan Kecamatan dengan memaparkan dampak dampak serta keuntungan yang didapatkan dengan mengikuti program di UPPKS di Kecamatan Padang Laweh, dan upaya selanjutnya adalah agar pembinaan lebih sering dilakukan dengan jadwal yang dibuat lebih sering dan materi yang disampaikan lebih variatif agar bisa diaplikasikan dalam pelaksanaan program UPPKS di Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya.

5. Kemampuan SDM Untuk Mengimplementasikan Program UPPKS

Kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) yang terlibat dalam implementasi pemberdayaan ekonomi melalui program UPPKS sangat penting untuk memastikan kesuksesan program. SDM yang terlibat dalam implementasi program UPPKS perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang konsep dan prinsip pemberdayaan ekonomi, manajemen usaha mikro, keuangan, pemasaran, dan keterampilan wirausaha. Mereka juga harus memiliki pemahaman tentang situasi ekonomi lokal dan peluang usaha yang tersedia. Pelatihan dan pendidikan yang relevan perlu diberikan kepada SDM untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. SDM yang terlibat dalam program UPPKS perlu memiliki kemampuan pendampingan yang baik. Mereka harus mampu memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan kepada keluarga peserta dalam pengembangan usaha mereka. Kemampuan untuk membantu mengidentifikasi masalah, memberikan solusi, dan memfasilitasi pemecahan

masalah juga diperlukan. Kemampuan interpersonal dan komunikasi yang baik sangat penting dalam menjalin hubungan yang positif dengan keluarga peserta. SDM harus memiliki pemahaman yang baik tentang konteks lokal di Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya. Mereka perlu mengerti kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Hal ini akan membantu mereka mengadaptasi pendekatan dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat yang dilayani. Pemahaman tentang peraturan dan kebijakan pemerintah daerah terkait pemberdayaan ekonomi juga diperlukan.

Dalam implementasinya sumber daya manusia sudah cukup baik dalam melakukan tugasnya dan kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan tugasnya dengan cukup baik seperti PLKB yang sudah mampu melakukan pembinaan, pengawasan, serta pendampingan untuk kelompok, selain itu masyarakat juga turut menjadi pihak yang turut serta dalam pelaksanaan di program UPPKS di Kecamatan Padang Laweh dimana masyarakat turut berpartisipasi dengan cara membeli produk dari kelompok UPPKS yang ada di Kecamatan Padang Laweh. Dari kendala yang dihadapi terdapat kendala yaitu kurangnya pengetahuan kelompok terkait teknologi digital sehingga dalam kegiatan pembukuan keuangan dan agenda masih dilakukan secara manual. Hal ini tentu menjadi acuan untuk pembenahan agar program UPPKS ini dapat berjalan lebih baik lagi. Adapun upaya yang bisa dilakukan adalah dengan membuat jadwal kunjungan yang jelas oleh pihak dinas sosial P3AP2KB agar Kepala Seksi bisa memenuhi tugasnya memberikan pelatihan dan pembinaan untuk kelompok UPPKS di Kecamatan Padang Laweh dan untuk kendala yang dialami sekretaris hendaknya pihak dinas sosial P3AP2KB ataupun Pihak PLKB memberikan pelatihan serta pembinaan teknologi digital kepada sekretaris maupun seluruh anggota UPPKS agar bisa memudahkan kelompok melakukan kegiatan usahanya, serta diberikannya bantuan sarana dan prasarana seperti laptop atau Komputer yang bisa dipakai oleh kelompok jika diperlukan merupakan upaya yang bagus untuk pemerintah.

6. Pengawasan

Tinjauan kelengkapan merupakan bentuk pengawasan dari PLKB yang langsung mendatangi kegiatan usaha para anggota kelompok yang telah diberi pembinaan, Dan PLKB melaporkan kepada Camat terkait perkembangan kelompok UPPKS. Karena kegiatan ini begitu penting dilaksanakan supaya kita dapat melihat kegiatan-kegiatan dan juga hambatan-hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program ini berlangsung sehingga pihak Pembina dapat membuat keputusan-keputusan mengenai hal-hal tersebut. Dalam kegiatan ini PLKB secara rutin memantau perkembangan kelompok dengan cara mengumpulkan laporan bulanan serta kunjungan lapangan kelompok UPPKS di Kecamatan Padang Laweh. hal tersebut berguna demi kelancaran pelaksanaan program pembinaan usaha kelompok UPPKS di Kecamatan Padang Laweh. Dengan melakukan kegiatan terjun lapangan pihak PLKB dapat melihat keseriusan kelompok UPPKS ini menjalankan usahanya sesuai yang diharapkan dan juga kendala-kendala yang dihadapi kelompok kelompok UPPKS tersebut. Adapun kendala dalam pengawasan yang dilakukan untuk

kelompok UPPKS di Kecamatan Padang Laweh adalah sulitnya anggota untuk berkumpul di kantor Balai KB. Sulit untuk melakukan pertemuan yang terlalu sering di Kantor Balai KB di karenakan sibuk mengurus usaha kelompok masing masing hal ini menjadi kendala untuk PLKB untuk mengawasi perkembangan kelompok UPPKS. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan kunjungan lapangan serta pengumpulan laporan bulanan secara rutin kepada PLKB.

Berdasarkan poin-poin diatas dapat penulis analisa bahwa implementasi program usaha peningkatan pendapatan keluarga di Kecamatan Padang Laweh kabupaten dharmasraya belum didasarkan pada standar operasional sistem (SOP) atau dominan pada budaya formalitas dikarenakan para implementator selalu mengatakan bahwa program diimplementasikan dengan bukti laporan yang bagus. Namun demikian dalam laporan tersebut tidak pernah mempersoalkan apakah tujuan program tersebut benar-benar tercapai atau tidak.

KESIMPULAN

Mengimplementasikan pemberdayaan ekonomi melalui Program UPPKS memiliki beberapa kesimpulan bahwa pentingnya pemberdayaan ekonomi keluarga melalui Program UPPKS karena memberikan kesempatan kepada keluarga untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi. Melalui program ini, keluarga dapat memperoleh modal usaha, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka. Implementasi program UPPKS membutuhkan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat. Kerjasama yang baik dalam hal pendanaan, pelatihan, pendampingan, dan akses ke pasar akan memperkuat pelaksanaan program dan hasilnya. Program UPPKS tidak hanya memberikan bantuan modal usaha, tetapi juga perlu melibatkan aspek pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan jaringan usaha. Pendekatan holistik ini akan membantu keluarga peserta mengembangkan keterampilan, meningkatkan pengetahuan, memperluas jaringan, dan meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka. Evaluasi program secara berkala sangat penting untuk mengevaluasi keberhasilan dan dampak program UPPKS. Evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, serta memberikan masukan untuk perbaikan dan penyesuaian kebijakan dan strategi program. Serta Implementasi program UPPKS memerlukan dukungan dan pembinaan yang berkelanjutan terhadap keluarga peserta. Pembinaan dapat meliputi pengembangan keterampilan, manajemen usaha, pemasaran, dan akses ke pasar. Dukungan yang berkelanjutan akan membantu keluarga peserta menjaga keberlanjutan usaha mereka setelah program berakhir. Dengan implementasi yang baik, program UPPKS memiliki potensi untuk memberdayakan ekonomi keluarga, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera bagi masyarakat di Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya.

DAFTAR PUSTAKA

Adi IR. Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat [Internet]. scholar.ui.ac.id; 2015.

- Bialvi L. Efektivitas program upaya peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) di kecamatan Lareh Sago Halaban kabupaten Lima Puluh Kota [Internet]. scholar.unand.ac.id; 2021.
- Cicik LHM. Program UPPKS dan Kegiatan Pemberdayaan Ibu-Ibu. Info Demogr Progr UPPKS dan Kegiat Pemberdaya Ibu-Ibu [Internet]. 2017.
- Ismail R. Metode Penelitian Kualitatif [Internet]. books.google.com; 2009.
- Kartasmita G. Pembangunan untuk rakyat: memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Cides; 1996.
- Mardhatillah M. Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kota Padang Panjang. J Ilm Ekotrans Erud [Internet]. 2021
- M, Tasikmalaya K. Asep Suryanto Asep Saepulloh. 2016;5(2):150–76.
- Syamsi I, Haryanto. Buku Penyandang Masalah Kesejahteraan. 2018.
- Zubaedi WPA. Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Ar Ruzz Media. 2007.